



DOI: <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Orientasi Politik Generasi Z di Era Digital dalam Perspektif Psikologi Politik: Studi Kasus Siswa SMA N 2 Wonosobo Tahun Ajaran 2025/2026

Aditya Insanurrohman^{1*}, Supartinah²

¹Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia, insanurrahmanaditya@email.com

²Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia, supartinah@unsiq.ac.id

*Corresponding Author: insanurrahmanaditya@email.com¹

Abstract: *The development of information technology and social media has transformed the way Generation Z understands and responds to political issues. This study aims to examine the political orientation of Generation Z students in the digital era from the perspective of political psychology, and to identify the psychological factors that influence their political tendencies. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving students from class X, XI, and XII as well as three teachers at SMA Negeri 2 Wonosobo Academic Year 2025/2026. The results indicate that social media particularly TikTok, Instagram, YouTube, and X has become the primary source of political information for these students, fostering critical political perspectives but also rendering them vulnerable to hoaxes, polarization, and emotionally driven opinions. Three dominant psychological factors were identified: political efficacy (with developed internal efficacy but low external efficacy), political cynicism (fueled by repeated exposure to corruption news), and affective polarization (traces of which remained after the 2024 Presidential Election). The study concludes that Generation Z possesses a dynamic, critical, yet digitally dependent political orientation. Enhanced political education and digital literacy are urgently needed to cultivate rational, democratic, and responsible civic engagement.*

Keywords: *Political Orientation, Generation Z, Political Psychology, Digital Media.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara generasi muda memahami dan merespons isu politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji orientasi politik Generasi Z di era digital dalam perspektif psikologi politik, serta mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kecenderungan politik mereka. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap siswa kelas X, XI, dan XII serta tiga guru di SMA Negeri 2 Wonosobo Tahun Ajaran 2025/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial terutama TikTok, Instagram, YouTube, dan X menjadi sumber utama informasi politik siswa, mendorong cara pandang yang lebih kritis sekaligus rentan terhadap hoaks,

polarisasi, dan opini emosional. Tiga faktor psikologis dominan teridentifikasi: efikasi politik (internal efficacy berkembang, namun external efficacy rendah), sinisme politik (dipicu oleh paparan berulang berita korupsi), dan polarisasi afektif (jejak Pilpres 2024 masih terasa). Penelitian menyimpulkan bahwa Generasi Z memiliki orientasi politik yang dinamis, kritis, dan sangat bergantung pada media digital, sehingga pendidikan politik dan literasi digital yang lebih baik sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Orientasi Politik, Generasi Z, Psikologi Politik, Media Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial secara fundamental telah mengubah cara generasi muda memahami, menerima, dan merespons isu-isu politik. Generasi Z mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang menjadikan akses terhadap informasi politik semakin cepat, luas, dan terbuka. Menurut laporan We Are Social dan DataReportal (2024), pengguna internet aktif di Indonesia mencapai lebih dari 185 juta jiwa, dengan proporsi pengguna muda usia 16–24 tahun yang mendominasi konsumsi konten di platform-platform seperti TikTok, Instagram, dan X. Realitas ini menjadikan media sosial bukan sekadar kanal hiburan, melainkan arena utama pembentukan orientasi dan sikap politik generasi berikutnya.

Namun demikian, derasnya arus informasi digital juga membawa risiko yang tidak dapat diabaikan. Survei Katadata Insight Center (2024) mengungkapkan bahwa mayoritas anak muda Indonesia memantau kabar politik melalui media sosial dan berita daring, tanpa disertai kemampuan verifikasi yang memadai. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius tentang kerentanan Generasi Z terhadap hoaks, disinformasi, polarisasi afektif, dan pembentukan opini yang lebih bersifat emosional daripada berbasis analisis substansi.

Studi-studi terdahulu mengenai orientasi politik generasi muda umumnya berfokus pada aspek partisipasi elektoral (Wahyuningsih, 2023; Putri, 2025) atau peran media sosial secara umum (Kurniawan dkk., 2024). Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif psikologi politik yakni dimensi efikasi politik, sinisme politik, dan polarisasi afektif dalam konteks pendidikan menengah atas masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan urgensi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan orientasi politik Generasi Z di era digital dalam perspektif psikologi politik pada siswa SMA Negeri 2 Wonosobo; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kecenderungan orientasi politik siswa tersebut. Dengan memahami secara mendalam profil psikopolitik Generasi Z di tingkat sekolah menengah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan politik dan literasi digital yang lebih efektif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena orientasi politik dalam konteks nyata dan spesifik, yakni lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Wonosobo Tahun Ajaran 2025/2026. Paradigma penelitian yang digunakan adalah interpretivisme, yang menekankan pada pemahaman terhadap makna dan pengalaman subjektif para informan.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan enam siswa yang dipilih secara purposive dari tiga jenjang kelas berbeda dua siswa dari kelas X (Cinta Aura Salsabila dan Mazaya Haifa), dua siswa dari kelas XI (Naura Sabriya dan Shafa Virda Putra), serta satu siswa kelas XII

(Harsa Hidar Rahman) serta tiga guru, yakni Tri Mulyani (Guru BK), Drs. Bambang Setiawan (Guru PPKn), dan Yularti (Guru Sejarah). Data sekunder diperoleh dari observasi lingkungan sekolah dan dokumentasi kegiatan pembelajaran.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan tiga konstruk psikologi politik utama: political efficacy, political cynicism, dan affective polarization. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga alur kegiatan simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Politik Generasi Z di Era Digital

Orientasi politik merupakan konsep sentral dalam psikologi politik yang merujuk pada keseluruhan sikap, nilai, persepsi, dan kecenderungan perilaku individu terhadap dunia politik. Almond dan Verba (1963) dalam karya klasik mereka *The Civic Culture* membagi orientasi politik ke dalam tiga dimensi: orientasi kognitif (pengetahuan dan kepercayaan tentang sistem politik), orientasi afektif (perasaan dan emosi terhadap sistem politik), dan orientasi evaluatif (penilaian dan opini tentang sistem politik). Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dalam membentuk identitas politik seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pemahaman politik siswa SMA N 2 Wonosobo bersifat pragmatis, kontekstual, dan experiential. Siswa kelas XII mampu menghubungkan nilai-nilai demokrasi formal dengan kehidupan bermasyarakat, sedangkan siswa kelas X masih mendefinisikan politik dalam kerangka yang lebih normatif dan kelembagaan. Pola ini relevan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menjelaskan bahwa kemampuan berpikir abstrak berkembang secara progresif seiring penambahan usia dan akumulasi pengalaman.

Temuan paling konsisten adalah dominasi absolut media sosial sebagai sumber informasi politik. Seluruh informan menyebutkan TikTok, Instagram, YouTube, dan X sebagai saluran utama konsumsi isu politik, tanpa satu pun yang menyebut surat kabar cetak atau radio. Fenomena ini mencerminkan apa yang Bennett dan Segerberg (2013) sebut sebagai *connective action* penyebaran informasi politik melalui jaringan sosial personal yang difasilitasi platform digital.

Tabel 1. Karakteristik Platform Media Sosial dalam Konsumsi Politik Siswa SMA N 2 Wonosobo

No.	Platform	Karakteristik Konsumsi Politik	Temuan dari Wawancara
1.	TikTok	Algoritma kuat, konten pendek-visual, pengguna mudah diarahkan narasi dominan	Paling banyak digunakan; rentan disinformasi; buzzer aktif; cepat viral namun dangkal substantif
2.	Instagram	Bersifat lebih netral; campuran konten hiburan dan informasi	Digunakan untuk informasi dan hiburan; ada yang kritis, ada yang mudah terpengaruh
3.	X (Twitter)	Debat terbuka, fitur threading, pengguna lebih kritis	Dianggap lebih kredibel; lebih sedikit buzzer; cocok untuk informasi politik substantif
4.	YouTube/Facebook/TV	Konten panjang dan kontekstual, lebih terstruktur	Digunakan sebagai sumber pelengkap; lebih banyak diakses bersama keluarga

Sumber: Data Primer, diolah Peneliti (2025)

Faktor-Faktor Psikologis yang Memengaruhi Orientasi Politik

1. Political Efficacy

Efikasi politik pertama kali dikonseptualisasikan oleh Campbell, Gurin, dan Miller (1954) sebagai keyakinan individu bahwa tindakan politiknya memiliki dampak nyata, dan bahwa sistem politik cukup responsif terhadap partisipasi warga. Penelitian ini menemukan bahwa internal efficacy siswa SMA N 2 Wonosobo sudah mulai terbentuk, ditandai kemampuan memahami dan mendiskusikan isu politik. Namun external efficacy mereka masih rendah, mereka belum merasa suara dan aspirasi mereka cukup berpengaruh dalam lanskap politik yang didominasi orang dewasa.

Hambatan partisipasi muncul dalam dua bentuk. Pertama, age-based political inhibition, yakni persepsi belum layak secara usia untuk terlibat wacana politik. Kedua, kekhawatiran terhadap rekam jejak digital yang mendorong siswa untuk hanya menyimpan tanpa berkomentar di ruang publik digital. Perilaku ini mencerminkan cost-benefit calculation (Rosenstone dan Hansen, 1993) di mana risiko jejak digital dipersepsikan lebih besar dari manfaat partisipasi. Paradoksnya, kesadaran ini justru menunjukkan tingkat literasi digital yang cukup tinggi. Inisiatif simulasi pemilihan ketua OSIS yang menyerupai mekanisme pemilu dengan mengundang KPU dan Bawaslu merupakan praktik terbaik experiential democracy learning yang efektif dalam membangun proto-efficacy siswa.

2. Political Cynicism

Sinisme politik merupakan faktor psikologis yang paling menonjol dan konsisten ditemukan di seluruh kelompok informan. Sinisme ini tidak bersumber dari satu peristiwa tunggal, melainkan dari akumulasi paparan terhadap pemberitaan negatif kasus korupsi pejabat, perilaku anggota legislatif yang tidak patut, dan inkonsistensi kebijakan yang mengalir tanpa henti melalui media sosial. Cappella dan Jamieson (1997) dalam karya Spiral of Cynicism menemukan bahwa pola pemberitaan media dengan bingkai konflik dan skandal secara kumulatif mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Temuan ini sangat relevan dengan pengalaman para informan yang mengalami siklus berulang: harapan yang tumbuh seiring naiknya tokoh baru, diikuti kekecewaan yang kemudian mengendap menjadi apatis.

Meskipun demikian, sinisme yang ditemukan tidak sepenuhnya pasif dan destruktif. Sebagian informan menunjukkan potensi sinisme produktif, di mana kekecewaan justru mendorong sikap lebih selektif dan kritis dalam mengonsumsi informasi. Dengan pendampingan yang tepat, sinisme ini berpotensi ditransformasi menjadi critical citizenship yang produktif.

3. Affective Polarization

Polarisasi afektif didefinisikan oleh Iyengar dkk. (2019) sebagai fenomena di mana individu tidak hanya berbeda secara ideologis, tetapi juga mengembangkan perasaan antipati yang kuat terhadap kelompok politik yang berbeda pandangan. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa jejak Pilpres 2024 masih terasa nyata di lingkungan sekolah, bahkan menembus ke dalam relasi pertemanan sehari-hari. Settle (2018) dalam Frenemies menemukan bahwa paparan konten politik yang memancing emosi negatif di media sosial secara aktif memperburuk polarisasi afektif melalui mekanisme exposure dan expression.

Polarisasi afektif tampak pula dalam pola penilaian tokoh politik oleh siswa yang lebih berbasis citra media sosial (impression-based evaluation) daripada rekam jejak atau substansi kebijakan. Kondisi ini sangat rentan terhadap manipulasi citra dan pembentukan opini yang tidak mengakar pada analisis faktual. Dalam perspektif Social Identity Theory (Tajfel dan Turner, 1979), ketika identitas kelompok menjadi sangat menonjol, individu cenderung mengevaluasi in-group secara positif dan out-group secara negatif, tanpa mempertimbangkan fakta yang berseberangan.

Tabel 2. Ringkasan Faktor Psikologis dan Manifestasinya dalam Orientasi Politik Siswa

No.	Faktor Psikologis	Manifestasi Temuan	Bukti dari Wawancara
1.	<i>Political Efficacy</i> (Efikasi Politik)	Internal efficacy mulai berkembang; external efficacy rendah; inhibisi akibat hambatan usia dan kekhawatiran jejak digital	"Belum cukup umur untuk mengkritik" (kelas X); "Takut rekam jejak digital" (kelas XI); aktif diskusi Pilpres meski belum bisa memilih (kelas XII)
2.	<i>Political Cynicism</i> (Sinisme Politik)	Apatis dan muak terhadap kondisi politik; siklus harapan-kekecewaan berulang; potensi sinisme produktif ada namun perlu pendampingan	"Saya merasa muak dan apatis" (kelas XII); "Prihatin dengan politisi" (kelas X); "Ketidakpercayaan muncul dari berita korupsi" (Guru PPKn)
3.	<i>Affective Polarization</i> (Polarisasi Afektif)	Diskusi berubah jadi saling olok saat Pilpres 2024; jejak polarisasi masih memengaruhi pertemanan; penilaian tokoh berbasis citra medsos	"Bukan berdiskusi tapi saling mengejek" (kelas XII); "Tinggalan Pilpres 2024 masih dirasakan sampai pertemanan" (Guru PPKn)

Sumber: Data Primer, diolah Peneliti (2025)

Peran Institusi Pendidikan

Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran yang tidak dapat digantikan dalam memediasi antara paparan media sosial yang sarat sinisme dan polarisasi, dengan pembentukan orientasi politik yang sehat. Ketiga guru yang menjadi informan menekankan pentingnya pendekatan holistik berbasis karakter dalam pendidikan politik. Tri Mulyani menekankan bahwa demokrasi perlu ditanamkan bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, melainkan sebagai karakter dan cara hidup. Drs. Bambang Setiawan menyoroti peran guru sebagai fasilitator yang netral namun kritis, membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan menghindari fanatisme buta. Program simulasi pemilihan ketua OSIS yang menghadirkan KPU dan Bawaslu merupakan contoh konkret praktik experiential democracy learning yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai orientasi politik Generasi Z di era digital dalam perspektif psikologi politik pada siswa SMA Negeri 2 Wonosobo Tahun Ajaran 2025/2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orientasi politik siswa Generasi Z di SMA Negeri 2 Wonosobo terbentuk melalui interaksi antara lingkungan sosial, pendidikan, dan media digital. Media sosial menjadi sumber utama informasi politik yang menghasilkan cara pandang lebih kritis sekaligus rentan terhadap hoaks dan polarisasi.
2. Dari perspektif psikologi politik, tiga faktor psikologis dominan memengaruhi kecenderungan orientasi politik siswa: (a) efikasi politik, dengan internal efficacy yang mulai berkembang namun external efficacy yang masih rendah; (b) sinisme politik yang bersumber dari akumulasi paparan berita negatif di media digital, meskipun memiliki potensi sinisme produktif; dan (c) polarisasi afektif yang diwariskan dari dinamika Pilpres 2024 dan berpotensi menetap tanpa intervensi pendidikan yang tepat.
3. Generasi Z memiliki orientasi politik yang dinamis, kritis, dan sangat bergantung pada media digital, sehingga pendidikan politik berbasis literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

Saran

Bagi sekolah, diharapkan meningkatkan program pendidikan politik dan literasi digital, tidak hanya secara teoritis tetapi juga melalui pendekatan experiential seperti simulasi pemilu.

Bagi guru PPKn, IPS, dan BK, diharapkan menjadi fasilitator dialog yang sehat mengenai isu-isu politik tanpa mendorong polarisasi. Bagi siswa Generasi Z, perlu meningkatkan kemampuan verifikasi informasi dan mengembangkan perspektif yang multidimensi. Bagi pemerintah dan KPU/Bawaslu, diharapkan mengembangkan program pendidikan politik yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z melalui pendekatan digital yang kreatif dan interaktif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dengan cakupan lebih luas menggunakan pendekatan mixed methods akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai orientasi politik Generasi Z di Indonesia.

REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Anshori, M., & Surwati, C. H. D. (2025). Experiencing Multicultural Awareness and Affective Polarization: A Phenomenological Inquiry. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/393868478>
- Arifin, M. (2024). *Sinisme Politik Generasi Muda di Era Digital*. Deepublish.
- Arifin, W. W. A. (2024). Berita Politik dan Sikap Politik Generasi Z pada Pemilihan. *Jurnal ComDent*. <https://jurnal.unpad.ac.id/comdent/article/view/61146>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1954). *The Voter Decides*. Row, Peterson.
- Cappella, J. N., & Jamieson, K. H. (1997). *Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good*. Oxford University Press.
- Craig, S. C., Niemi, R. G., & Silver, G. E. (1990). Political Efficacy and Trust. *Political Behavior*, 12(3), 289–314. <https://doi.org/10.1007/BF00992337>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. John Wiley & Sons.
- Inglehart, R. (1977). *The Silent Revolution*. Princeton University Press.
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and Loathing across Party Lines. *American Journal of Political Science*, 59(3), 690–707.
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States. *Annual Review of Political Science*, 22, 129–146.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kartikasari, D., & Fauzi, M. (2022). Building Political Literacy with Z Generation Participation. *Jurnal Masyarakat dan Budaya BRIN*.
- Katadata Insight Center. (2024). Mayoritas Anak Muda Indonesia Sering Terpapar Berita Politik. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/8e24f420e2a071d>
- Keegan, P. (2023). The Impact of Polarization on the Political Engagement of Generation Z. *Democracy Education Journal*.
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social Media's Influence on Political Participation. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 336–355. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi>
- Lestari, P., et al. (2025). Enhancing Generation Z's Political Efficacy Through Social Media Political Influencers. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/395898921>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muluk, H., & Pratama, M. A. (2019). Sinisme Politik dan Kepercayaan terhadap Pemerintah di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(2), 101–112.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Piaget, J. (2001). *The Psychology of Intelligence*. Routledge.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Putri, A. A. (2025). Tren Golput Generasi Z. *Jurnal Media Akademik*.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/2711/2130/7716>
- Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (1993). *Mobilization, Participation, and Democracy in America*. Macmillan.
- Settle, J. E. (2018). *Frenemies: How Social Media Polarizes America*. Cambridge University Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital*. McGraw-Hill.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality*. Harvard University Press.
- Wahyuningsih, A. (2023). Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilu 2024. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(2).
- We Are Social & DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia Report*.
<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>